



Peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Kawasan Nyaru Menteng Arboretum Kota Palangka Raya

Apriyadi ¹⁾; Andi Saputra ²⁾; Simson Oktelhanan Lukius ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Palangka Raya, FISIP, Ilmu Administrasi Negara

Email: apri80298@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [26 Maret 2026]

Revised [22 Juni 2026]

Accepted [26 Juni 2026]

KEYWORDS

Policy Implementation, Sustainable Tourism, George C. Edward III, Urban Forest, Forestry Service.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan dan pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan Hutan Kota Nyaru Menteng Arboretum Kota Palangka Raya menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III. Kawasan Nyaru Menteng yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan reintroduksi orangutan kini menghadapi tantangan transformasi pengelolaan dari kawasan konservasi menjadi destinasi wisata berkelanjutan setelah perubahan status menjadi areal penggunaan lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan dapat dianalisis melalui empat variabel Edward III: (1) komunikasi terwujud melalui sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2021 dan koordinasi dengan stakeholder; (2) sumber daya meliputi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur wisata dan penempatan 14 petugas kebersihan; (3) disposisi terlihat dari komitmen aparatur dalam menjaga kelestarian lingkungan dan edukasi konservasi; serta (4) struktur birokrasi tercermin dalam koordinasi antar-unit kerja dan penerapan SOP pengelolaan kawasan. Temuan ini mengisi research gap literatur tentang implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di kawasan hutan kota pasca-rehabilitasi satwa liar di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Central Kalimantan Provincial Forestry Service in managing and developing sustainable tourism in the Nyaru Menteng Arboretum Urban Forest area in Palangka Raya City using George C. Edward III's public policy implementation framework. The Nyaru Menteng area, which previously functioned as an orangutan rehabilitation and reintroduction center, now faces transformation challenges from a conservation area to a sustainable tourism destination after its status change to non-forest land. This research employs a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results indicate that the implementation of sustainable tourism development policies can be analyzed through Edward III's four variables: (1) communication—evidenced through the socialization of Central Kalimantan Governor Regulation Number 37 of 2021 and coordination with stakeholders; (2) resources—including budget allocation for tourism infrastructure development and deployment of 14 cleaning officers; (3) disposition—reflected in the commitment of apparatus in maintaining environmental sustainability and conservation education; and (4) bureaucratic structure—reflected in inter-unit coordination and implementation of SOPs for area management. These findings fill the research gap in literature regarding sustainable tourism policy implementation in urban forest areas post-wildlife rehabilitation in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Di satu sisi, sektor kehutanan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain tekanan terhadap kelestarian lingkungan semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, pengembangan wisata berbasis hutan menjadi salah satu alternatif strategi yang dapat mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan konservasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengembangan ekowisata pada kawasan hutan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek potensi wisata dan pengelolaan kawasan. Penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan dalam pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan hutan kota masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan Hutan Kota Nyaru Menteng menggunakan kerangka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan tersebut.

LANDASAN TEORI

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut UNWTO (2018), pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks kawasan hutan, konsep ini menjadi penting karena adanya tuntutan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di tengah aktivitas wisata.

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori George C. Edward III (1980). Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat agar tidak terjadi distorsi. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung.

Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, standar operasional prosedur (SOP), serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan dari Edward III digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk mengkaji peran Dinas Kehutanan dalam pengembangan wisata berkelanjutan di kawasan Hutan Kota Nyaru Menteng.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan Hutan Kota Nyaru Menteng Arboretum. Studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks nyata dengan mempertimbangkan proses dinamis implementasi kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan kunci dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Kota Palangka Raya, Pokdarwis Nyaru Menteng, dan masyarakat sekitar kawasan. Wawancara menggunakan pedoman berbasis empat variabel Edward III. Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur wisata, kebersihan kawasan, aktivitas pengunjung, dan keberadaan satwa liar selama periode penelitian. Studi Dokumentasi: Analisis terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2021, dokumen perencanaan Dinas Kehutanan, laporan keuangan, dan data sekunder terkait.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) tematik berdasarkan kerangka konseptual Edward III. Proses analisis meliputi:



- (1) reduksi data,
- (2) penyajian data dalam matriks berdasarkan variabel dan indikator, dan
- (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kebijakan: Transformasi Nyaru Menteng

Nyaru Menteng mengalami transformasi fundamental dari pusat rehabilitasi orangutan yang dikelola BOSF menjadi Hutan Kota yang dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2021, Dinas Kehutanan diberi mandat untuk mengelola kawasan seluas 100 hektar sebagai hutan kota yang berfungsi untuk pelestarian keanekaragaman hayati, rekreasi, edukasi, dan penelitian. Transformasi ini menciptakan kompleksitas implementasi kebijakan karena harus menyeimbangkan tiga kepentingan: konservasi satwa liar (kera ekor panjang dan spesies lain), pengembangan ekonomi pariwisata, dan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Implementasi Kebijakan Perspektif Edward III

Variabel Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan telah melakukan komunikasi kebijakan melalui beberapa mekanisme:

- Kejelasan Transmisi Informasi: Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 dilakukan kepada stakeholder internal Dinas Kehutanan dan eksternal (Pokdarwis, masyarakat). Informasi tentang perubahan status kawasan dan implikasinya terhadap akses masyarakat telah disampaikan melalui pertemuan-pertemuan koordinasi.
- Konsistensi Implementasi: Terdapat konsistensi dalam penegakan aturan penggunaan kawasan, terutama terkait larangan membuang sampah dan membawa pulang tumbuhan atau satwa. Namun, ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan aturan batas area pengunjung terhadap zona rehabilitasi satwa.
- Koordinasi dengan Stakeholder: Dinas Kehutanan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan lomba fotografi dan videografi serta rencana kegiatan pertunjukan seni budaya. Kerja sama ini menunjukkan upaya komunikasi horizontal yang aktif.
- Sesuai dengan teori Edward III, komunikasi yang efektif mengurangi distorsi pemahaman kebijakan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pengunjung masih belum memahami status konservasi kawasan dan batasan perilaku yang diperbolehkan, mengindikasikan adanya communication gap yang perlu diperbaiki.

Variabel Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia: Dinas Kehutanan menempatkan sekitar 14 petugas kebersihan yang bertugas membersihkan area kawasan setiap hari. Selain itu, terdapat petugas keamanan dan pemandu wisata yang dikelola. Namun, jumlah ini dinilai masih kurang memadai mengingat luas kawasan 100 hektar dan tingkat kunjungan yang meningkat.
- Sumber Daya Anggaran: Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur wisata meliputi jembatan titian, gazebo, aula, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya. Alokasi ini menunjukkan komitmen financial dalam pengembangan kawasan.
- Fasilitas Implementasi: Ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan setapak, tempat sampah, dan papan informasi telah mendukung aktivitas wisata. Namun, fasilitas interpretasi edukasi konservasi masih terbatas.
- Otoritas: Dinas Kehutanan memiliki kewenangan formal berdasarkan Peraturan Gubernur untuk mengelola kawasan, namun kewenangan ini terbatas pada koordinasi dengan BOSF yang masih memiliki kepentingan konservasi di area tertentu.

- Edward III menekankan bahwa kekurangan sumber daya merupakan penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Dalam konteks Nyaru Menteng, meskipun terdapat alokasi sumber daya, kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi-wisata dengan ketersediaan SDM dan anggaran masih menjadi tantangan utama.

Variabel Disposisi

- Kepatuhan Implementasi: Aparatur Dinas Kehutanan menunjukkan kepatuhan tinggi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan kota. Terdapat kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
- Kesesuaian Tugas: Penugasan personel dilakukan berdasarkan keahlian bidang kehutanan dan konservasi. Namun, ditemukan adanya kesenjangan kompetensi dalam manajemen pariwisata dan pelayanan wisatawan, mengingat latar belakang aparatur yang lebih dominan pada ilmu kehutanan ketimbang pariwisata.
- Insentif Implementasi: Implementasi kebijakan didorong oleh insentif non-material berupa penghargaan atas keberhasilan menjaga kelestarian kawasan. Namun, insentif financial terbatas karena keterbatasan anggaran operasional.
- Disposisi positif terlihat dari komitmen dalam pengawasan kawasan, pengelolaan sampah, dan perlindungan terhadap satwa. Sejalan dengan Edward III, disposisi implementor yang positif meningkatkan probabilitas keberhasilan kebijakan. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen destinasi wisata.

Variabel Struktur Birokrasi

- Standard Operating Procedures (SOP): Dinas Kehutanan telah menyusun SOP pengelolaan hutan kota yang mencakup prosedur pemeliharaan kebersihan, penanganan konflik satwa-manusia, dan penanganan kecelakaan wisatawan. SOP ini menjadi acuan operasional petugas lapangan.
- Fragmentasi dan Koordinasi: Pengelolaan kawasan melibatkan koordinasi multi-pihak: Dinas Kehutanan (pengelola utama), Dinas Pariwisata (promosi), Bappeda (perencanaan), dan BOSF (konservasi). Koordinasi ini terstruktur melalui mekanisme rapat koordinasi rutin, namun terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan area konservasi.
- Distribusi Tanggung Jawab: Tanggung jawab pengelolaan terdistribusi antara unit teknis Dinas Kehutanan (pengelolaan taman), unit perlindungan hutan (keamanan), dan unit kerja sama (kemitraan dengan Pokdarwis).
- Edward III memperingatkan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat menghambat implementasi kebijakan karena distorsi informasi. Di Nyaru Menteng, meskipun terdapat mekanisme koordinasi, kompleksitas keterlibatan multi-stakeholder (pemerintah, NGO, masyarakat, sektor swasta) menciptakan tantangan tersendiri dalam sinkronisasi kebijakan.

Sintesis Implementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis empat variabel Edward III, implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di Nyaru Menteng dapat dikategorikan dalam kondisi "berhasil dengan catatan" (qualified success). Komunikasi dan disposisi berada pada level memadai, sementara sumber daya dan struktur birokrasi masih menunjukkan kelemahan yang perlu perbaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di Hutan Kota Nyaru Menteng Arboretum dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori George C. Edward III. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan peran signifikan melalui:

- (1) komunikasi kebijakan yang terstruktur namun perlu perbaikan dalam sosialisasi kepada pengunjung;



- (2) alokasi sumber daya infrastruktur yang memadai namun terbatasnya sumber daya manusia khususnya tenaga ahli pariwisata;
- (3) disposisi positif aparaturnya dalam menjaga kelestarian lingkungan; dan
- (4) struktur birokrasi yang terorganisir namun menghadapi tantangan koordinasi multi-stakeholder.

Temuan ini mengisi research gap literatur tentang implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di kawasan hutan kota pasca-rehabilitasi satwa liar, sekaligus memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks tata kelola sumber daya alam.

Saran

1. Kebijakan: Dinas Kehutanan perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mengembangkan SOP khusus untuk manajemen wisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek konservasi.
2. Penelitian Mendatang: Disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dalam jangka panjang, serta studi komparatif dengan kawasan hutan kota lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. A., Kissinger, K., Nugroho, Y., & Fauzi, H. (2020). Analisis Vegetasi Hutan Kerangas di Arboretum Nyaru Menteng Kalimantan Tengah. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(1).
- Fauzi, F., Rahmawati, R., & Sandan, P. (2017). Estimation of Population Density and Food Sort of Kelasi (*Presbytis rubicunda*) in Nyaru Menteng Arboretum of Palangka Raya. *Jurnal Daun*, 4(1), 7–16.
- Gustiarini, A., Tampubolon, N., Saranga, N., Mustiah, D., & Kurniawan. (2023). Kriteria Eco Resort Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Perairan Waigeo Selatan Kepulauan Raja Ampat. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(3), 273–282.
- Java, E. (2025). Sustainable Tourism Development Analysis in Blimbingsari Tourism Village, Analisis Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur. *Sebatik*, 29(2), 512–520. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v29i1.2669>
- Kemenparekraf. (2022). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 10(1), 24–32.
- Mu'tashim, M. R., & Indahsari, K. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. 1st E-Proceeding SENRIABDI 2021, 1(1), 329–343.
- Panjaitan, D., Naibaho, F. G., Agnestisia, R., & Putra, I. P. (2023). Keanekaragaman Jamur Makroskopis di Hutan Gambut Arboretum Nyaru Menteng Kalimantan Tengah. *Konservasi Hayati*, 19(2).
- Rohaetin, S., Hariatama, F., Buji, G. E., Rakhmawati, D., & Lenlioni, L. (2024). Peran Pokdarwis Nyaru Menteng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tumbang Tahai. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 17(1).
- Saputra, P. W. (2025). Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 4(1), 37.
- Sardiana, I. K., & Sarjana, I. M. (2021). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Sustainable Livelihoods di Pemuteran Bali Utara. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(2), 337. <https://doi.org/10.24843/jkb.2021.v11.i02.p05>
- Seliari, T. (2021). Ekowisata: Utopia dalam Keberlanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(2), 193–203. <https://doi.org/10.30647/jip.v26i2>
- Uda, T., Rohaetin, S., Eriawaty, E., Barbara, B., Sukarno, Z. A., & Kuservina, K. (2025). Pendampingan Pokdarwis Batuah Masyarakat Nyaru Menteng dalam Pengembangan Ekowisata Hutan Kota Berkah. *Jurnal Punakawan*, 1(1), 19–26.

Uwi Martayadi, I., Wayan Suteja, I., Wisnu Adi Bhakti, & Bunga Fadhila Cantika Dewi. (2025). Pengelolaan Ekowisata Berbasis Ketahanan Ekologi dan Sosial untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Gili Trawangan, Lombok Utara. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 134–147. <https://doi.org/10.37253/altasia.v7i1.10011>